

IMPLEMENTASI KURIKULUM PENDIDIKAN DASAR LINGKUNGAN HIDUP DAN MITIGASI BENCANA DI SEKOLAH DASAR

Dita Anggraeni

Program Studi Manajemen Bencana Universitas Pertahanan

Kata Kunci :

Implementasi, Kurikulum, PLH, Sekolah Dasar

ABSTRACT

Integrating disaster risk reduction into formal education and the education curriculum has been suggested as a strategy to increase knowledge and understanding of disaster risk. Various parties have tried to make this happen but it is still at the national level and not at the local level and is not comprehensive. One effort that can be done is to implement an environmental education curriculum and disaster mitigation in schools. Elementary School is an educational institution with a golden age of children (golden age) where children will more easily understand the concept if applied early on. Environmental education is a local content taught in schools, by integrating disaster risk reduction material into the local content, capacity building can be done

ABSTRAK

Mengintegrasikan pengurangan risiko bencana ke dalam pendidikan formal dan kurikulum pendidikan telah disarankan menjadi sebuah strategi untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang risiko bencana. Berbagai pihak telah berupaya untuk mewujudkan hal tersebut namun masih pada tingkat nasional dan belum pada tingkat lokal dan tidak menyeluruh. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan mengimplementasikan kurikulum pendidikan lingkungan hidup dan mitigasi bencana di sekolah. Sekolah Dasar adalah lembaga pendidikan dengan usia emas anak (*golden age*) dimana anak-anak akan lebih mudah memahami konsep jika diterapkan sejak dini. Pendidikan lingkungan hidup merupakan muatan lokal yang diajarkan di sekolah, dengan mengintegrasikan materi pengurangan risiko bencana dalam muatan lokal tersebut maka peningkatan kapasitas tersebut dapat dilakukan

Email penulis:

ditaangraeni12@gmail.com

PENDAHULUAN

Bencana merupakan ancaman nonmiliter yang nyata ada di wilayah kedaulatan negara Indonesia. (Kementerian Pertahanan, 2015). Kondisi geologis Indonesia yang terletak pada tiga lempeng besar dunia menyebabkan Indonesia berpotensi untuk dilanda bencana gempa, gelombang tsunami dan erupsi gunung api. Selain itu, kondisi geografis berada di antara dua samudera yakni Samudera Hindia dan Pasifik menyebabkan Indonesia berada pada jalur

lintas angin munson barat dan munson timur yang menyebabkan adanya potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir, longsor, kekeringan juga kebakaran hutan. Berdasarkan data BNPB tahun 2017 tercatat 2.372 kejadian bencana yang didominasi oleh banjir, tanah longsor dan puting beliung yang merupakan bencana hidrometeorologi. (Rapangile, 2018). Tren bencana di Indonesia dari tahun ke tahun terlihat dinamis dengan adanya peningkatan dan penurunan. Dalam UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Pasal 1 point (1) disebutkan bahwa: “Bencana merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan/atau non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerugian harta benda, dan dampak psikologis”.

Setiap terjadi sebuah bencana selalu membawa kesedihan bagi para korban dan keluarga korban, menyebabkan kerugian dan terdampak pada kegiatan sosial, ekonomi, budaya, lingkungan serta menghambat kemajuan bagi penghidupan rakyat. Untuk itu, perlu adanya upaya yang sistematis, terukur, terencana dan berkelanjutan dalam pengurangan resiko, pencegahan dan penanganan bencana. Berdasarkan data Penurunan Indeks Risiko Bencana (InaRisk) BNPB tahun 2016, 21% wilayah Indonesia berada dalam wilayah rawan banjir, 27% wilayah rawan gempa bumi, dan 30% wilayah rawan longsor. Tidak ada satupun wilayah Kabupaten/Kota di Indonesia yang bebas dari ancaman bencana. (BNPB, 2016)

Berdasarkan data Direktorat Pengurangan Risiko Bencana, BNPB disebutkan bahwa 75% gedung sekolah berada pada rawan bencana. Sekolah merupakan tempat guru dan murid melakukan interaksi pembelajaran. Dalam setiap kejadian bencana, anak-anak menjadi kelompok paling rentan menjadi korban. Bencana tidak mengenal tempat dan waktu ketika dia datang, untuk itu mengutuk tentang kesadaran bencana dapat mulai ditumbuhkan sejak anak menempuh pendidikan di sekolah dan upaya pengurangan risiko bencana dapat juga dimulai dari sekolah tempat para siswa menuntut ilmu.

Sesuai amanat UU No. 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional, dijelaskan pada pasal 32 ayat (2): “Pendidikan layanan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.” Dan amanat UU Perlindungan Anak nomor 23 Tahun 2002 menyatakan pendidikan dan perlindungan secara khusus bagi anak-anak adalah sesuatu yang penting. Maka, pemerintah, pihak-pihak yang berwenang, serta lembaga-lembaga kompeten berkewajiban dan peduli untuk menjamin kebutuhan pendidikan dan perlindungan khusus tersebut terpenuhi. Dalam upaya mendukung sekolah dapat membangun kesiapsiagaan bencana, berbagai komponen baik lembaga maupun institusi telah melakukan berbagai kegiatan/program pendidikan pengurangan risiko bencana di tingkat sekolah.

Sekolah dianggap sebagai unit penting dalam upaya sosialisasi kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. Sekolah baik secara fisik maupun sosial harus mampu melindungi warga sekolah dari ancaman bencana. Untuk itu, penerapan sekolah aman bencana dianggap menjadi penting sebagai upaya pengurangan risiko bencana saat pra bencana. *United Nation International Strategy for Disaster Reduction (UNISDR)* memuat buku panduan tentang “Konstruksi Sekolah yang lebih Aman” (*Guidance Notes on Safer School Construction*) menyatakan bahwa kesiapsiagaan penting untuk diketahui dan dilatih agar kita memahami benar risiko bencana yang ada di lingkungan kita. BNPB melalui Perka No. 4 Tahun 2012

tentang pedoman sekolah aman bencana menjelaskan dalam kerangka kerja struktural dan kerangka kerja non struktural tentang hal-hal mendukung sekolah aman.

Selain fisik bangunan yang harus memenuhi standar pembangunan terlebih pada wilayah rawan bencana, mitigasi nonstruktural dari upaya peningkatan pengetahuan, sikap dan tindakan, kebijakan sekolah, perencanaan kesiapsiagaan dan mobilisasi sumber daya alam dapat diupayakan dalam pembelajaran di sekolah. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kurikulum PLH dan mitigasi bencana di Sekolah Dasar. Manfaat yang didapatkan dari penelitian ini adalah mengetahui implementasi pelajaran Pendidikan Lingkungan Hidup (PLH) sebagai sebuah muatan lokal sebagai sarana pengintegrasian materi pengurangan risiko bencana di Sekolah Dasar. Selain itu, menjadi bahan kajian bagi sekolah-sekolah dasar di Indonesia untuk menerapkan kurikulum tersebut pada wilayah-wilayah rawan bencana sesuai dengan konteks risiko bencana di wilayahnya tersebut

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bencana yang terjadi di Indonesia merupakan ancaman bagi keselamatan umum. Sebab bencana alam berakibat langsung maupun tidak langsung terhadap keselamatan juga penghidupan masyarakat. Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 4 yang menyatakan tujuan bangsa Indonesia yakni: "...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...". Oleh karenanya, segenap upaya di lakukan untuk dapat melindungi warga negara dari segala ancaman, baik ancaman yang bersifat militer maupun non militer. Sistem pertahanan negara untuk ancaman non militer menempatkan komponen utama yakni TNI dan Polri sebagai garda utama dalam upaya mengatasi ancaman didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung. Sedangkan, dalam ancaman non militer komponen utama mengatasi ancaman berada pada Kementrian/Lembaga terkait dengan ancaman. Dalam hal bencana, UU No. 24 Tahun 2007 tentang bencana menjelaskan bahwa Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai koordinator dalam pelaksanaan penanggulangan bencana di Indonesia. Ancaman dapat dihilangkan, dikurangi, dialihkan dan dihadapi. Dalam hal bencana, ancaman dapat dikurangi dengan upaya pengurangan risiko bencana. Dengan upaya itulah, ancaman terhadap keselamatan umum dapat dilakukan dengan tujuan risiko bencana yang dihadapi masyarakat hilang, berkurang atau dapat dialihkan.

Sebuah upaya untuk mengurangi risiko yang ditimbulkan akibat satu jenis bencana pada suatau wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta dan gangguan kegiatan masyarakat merupakan pengertian pengurangan risiko bencana menurut Perka BNPB No. 4 Tahun 2012. (Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2012). Sedangkan Menurut *United Nations-International Strategy for Disaster Reduction (UN-ISDR)*, PRB merupakan usaha sadar dan terencana dalam proses pembelajaran untuk memberdayakan peserta didik dalam upaya untuk mengurangi risiko bencana dan membangun budaya aman serta tangguh bencana (Ariantoni, 2009). (PRB kemudian diarealisasikan sebagai sebuah pengembangan motivasi, keterampilan dan pengetahuan agar dapat bertindak dan mengambil bagian dalam upaya pengurangan risiko bencana. Pengurangan risiko bencana yang berkaitan dengan pendidikan, perlu menjadi program prioritas dalam sektor pendidikan yang diwujudkan dalam pendidikan pengurangan risiko bencana di sekolah.

Penerapan sekolah aman bencana yang dijelaskan pada Perka BNPB No. 4 tahun 2018 tentang Pedoman Sekolah Aman terdapat dua kerangka kerja yakni Kerangka Kerja Struktural dan Kerangka Kerja Non Struktural. Kerangka kerja struktural adalah upaya pengurangan risiko bencana berdasarkan pengurangan risiko dari segi konstruksi fisik. Kerangka kerja non struktural adalah sebuah usaha dalam pengurangan risiko bencana yang tidak melibatkan konstruksi fisik. Namun upaya yang dilakukan dapat berupa pembuatan kebijakan seperti pembuatan peraturan, legislasi, kampanye penyadaran masyarakat, membangun sikap dan tindakan kesiapsiagaan kepada seluruh warga sekolah dalam menghadapi bencana, yaitu penyiapan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan.

Parameter	Indikator
1	2
Pengetahuan, Sikap dan Tindakan	Tersedianya pengetahuan mengenai bahaya (jenis bahaya), kerentanan, kapasitas; risiko dan sejarah bencana terjadi di lingkungan sekolah atau sekitarnya
	Tersedianya pengetahuan mengenai upaya yang bisa dilakukan untuk mengurangi risiko bencana di sekolah
	Keterampilan warga sekolah termasuk anak dalam menerapkan rencana aksi sekolah aman
	L terlaksananya sosialisasi mengenai pengetahuan PRB, Sekolah Aman Bencana dan kesiapsiagaan kepada warga sekolah termasuk anak.
	L terlaksananya pelatihan pengintegrasian PRB ke dalam KTSP
Kebijakan Sekolah	L terlaksananya kegiatan simulasi drill secara berkala di sekolah dan melibatkan masyarakat sekitar.
	Adanya kebijakan kesepakatan dan/atau peraturan sekolah yang mendukung penerapan sekolah aman dari bencana.
Perencanaan Kesiapsiagaan	Tersedianya akses bagi seluruh komponen sekolah terhadap informasi pengetahuan dan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas dalam hal PRB.
	Tersedianya dokumen penilaian risiko bencana yang disusun bersama secara partisipatif dengan warga sekolah, termasuk anak.
	Tersedianya rencana aksi sekolah dalam penanggulangan bencana (sebelum, saat dan sesudah terjadinya bencana).
	Tersedianya Sistem Peringatan Dini yang dipahami oleh seluruh warga sekolah
	Adanya prosedur tetap kesiapsiagaan sekolah yang disepakati dan dilaksanakan oleh seluruh warga sekolah.
	Adanya peta evakuasi sekolah dengan tanda dan rambu yang terpasang, yang mudah dipahami oleh seluruh warga sekolah termasuk anak berkebutuhan khusus.
Mobilisasi Sumber Daya	Kesepakatan dan ketersediaan lokasi evakuasi/shelter terdekat sekolah. Disosialisasikan kepada seluruh warga sekolah, orangtua dan masyarakat sekitar dan pemerintah daerah.
	Adanya prosedur tetap (kesiapsiagaan) sekolah yang disepakati dan dilaksanakan oleh seluruh warga termasuk anak.
	Jumlah dan jenis perlengkapan, suplai dan kebutuhan dasar pasca bencana yang dimiliki sekolah
Mobilisasi Sumber Daya	Adanya satgas yang melibatkan perwakilan peserta didik secara individu maupun kelompok
	Adanya kerjasama dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di kota/kabupaten dengan pihak-pihak terkait setempat (seperti perangkat desa/kelurahan, kecamatan, BPBD dan lembaga pemerintah lainnya)
	Pemantauan dan evaluasi partisipatif mengenai kesiapsiagaan dan keamanan sekolah secara rutin (menguji atau melatih kesiapsiagaan sekolah/madrasah secara berkala).

Berdasarkan pada tabel kerangka kerja non struktural di atas, maka dapat dilakukan pengintegrasian indikator-indikator kerangka kerja struktural sekolah aman pada kurikulum pembelajaran di sekolah. Pendidikan kebencanaan di sekolah membantu anak untuk dapat memainkan peran penting dalam upaya penyelamatan dan perlindungan terhadap dirinya dan orang lain ketika terjadi bencana.

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Muatan lokal merupakan kegiatan kurikuler untuk mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas dan potensi daerah, termasuk keunggulan daerah, yang materinya tidak dapat dikelompokkan ke dalam mata pelajaran yang ada. Subtansi mata pelajaran muatan lokal dapat ditentukan oleh satuan pendidikan dan tidak terbatas pada mata pelajaran keterampilan (Pedoman Pengembangan Model Mata Pelajaran Muatan Lokal, Kemendikbud).

Pendidikan Lingkungan Hidup banyak diadopsi di tingkat persekolahan sebagai sebuah muatan lokal. Pendidikan Lingkungan Hidup (*environmental education*) adalah

suatu proses untuk membangun populasi manusia di dunia yang sadar dan peduli terhadap lingkungan total (keseluruhan) dan segala masalah yang berkaitan dengannya, dan masyarakat yang memiliki pengetahuan, ketrampilan, sikap dan tingkah laku, motivasi serta komitmen untuk bekerja sama, baik secara individu maupun secara kolektif, untuk dapat memecahkan berbagai masalah lingkungan saat ini, dan mencegah timbulnya masalah baru [UN - Tbilisi, Georgia - USSR (1977) dalam Unesco, (1978)].

PLH memasukkan aspek afektif yaitu tingkah laku, nilai dan komitmen yang diperlukan untuk membangun masyarakat yang berkelanjutan (*sustainable*). Pencapaian tujuan afektif ini biasanya sukar dilakukan. Oleh karena itu, dalam pembelajaran guru perlu memasukkan metode-metode yang memungkinkan berlangsungnya klarifikasi dan internalisasi nilai-nilai. Dalam PLH perlu dimunculkan atau dijelaskan bahwa dalam kehidupan nyata memang selalu terdapat perbedaan nilai-nilai yang dianut oleh individu. Perbedaan nilai tersebut dapat mempersulit untuk *derive the fact*, serta dapat menimbulkan kontroversi/pertentangan pendapat. Oleh karena itu, PLH perlu memberikan kesempatan kepada siswa untuk membangun ketrampilan yang dapat meningkatkan kemampuan memecahkan masalah.

Untuk itu, integrasi pengetahuan pengurangan risiko bencana dapat dilakukan dengan memuat pelajaran sendiri, yakni muatan lokal salah satunya Pendidikan Lingkungan Hidup (PLH). Dengan begitu, pembelajaran tentang pengurangan risiko bencana dapat dilakukan pada jam pelajaran tanpa harus mengurangi jam pelajaran dan substansi mata pelajaran lainnya. Dalam pelajaran tersebut dapat juga diintegrasikan latihan-latihan dan simulasi ketika bencana terjadi, hal-hal apa saja yang dapat dilakukan ketika bencana terjadi baik di sekolah, di rumah atau dimanapun siswa berada. Kegiatan yang dilakukan berulang-ulang akan menghasilkan memori yang baik, terlebih pada anak. Sehingga upaya tersebut dirasa sangat efektif dilakukan dalam peningkatan pengetahuan, sikap dan tindakan warga sekolah terutama siswa.

Pembelajaran yang dilakukan dapat memuat tiga ranah pembelajaran baik kognitif, afektif dan psikomotorik, yang dijelaskan sebagai berikut:

No.	Ranah	Kegiatan
1.	Kognitif	Pengetahuan Kebencanaan, Jenis-Jenis Bencana, Cara Pencegahan, Cara Penanggulangan
2.	Afektif	Respon terhadap suatu keadaan, motivasi untuk melakukan sesuatu
3.	Psikomotorik	Gladi dan simulasi bencana (gempa bumi, kebakaran, tsunami, dll).

Pembelajaran muatan lokal dapat disesuaikan dengan wilayah dan daerah lokasi sekolah tersebut berada. Pada lokasi sekolah yang rawan bencana gempa bumi simulasi dan gladi sebagai bentuk kesiapsiagaan dalam menghadapi gempa menjadi hal yang prioritas untuk dilakukan.

KESIMPULAN

Selain mitigasi struktural yang berkaitan dengan fisik, upaya pengurangan risiko bencana juga dapat dilakukan dengan upaya mitigasi non struktural salah satunya melalui pembelajaran di sekolah. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mengintegrasikan materi kebencanaan sebagai bekal awal siswa mengetahui risiko bencana di daerahnya. Implementasi kurikulum pendidikan lingkungan hidup (PLH) dan Mitigasi Bencana di sekolah dapat menjadi salah satu cara yang dilakukan dalam

peningkatan kapasitas warga sekolah menghadapi bencana. PLH sebagai mata pelajaran muatan lokal dapat memuat substansi pembelajaran yang mencakup tiga ranah yakni kognitif, afektif dan psikomotorik tanpa harus mengurangi substansi pada mata pelajaran lainnya.

REFERENSI

- Ariantoni, 2009. Modul Pelatihan: *Pengintegrasian Pengurangan Resiko Bencana (PRB) Ke dalam Sistem Pendidikan* (Jakarta: Pusat Kurikulum Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Nasional)
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana. 2016. *Indeks Risiko Bencana Indonesia (InaRISK)*. Jakarta
- Hilman, Asep. Integrasi Pengurangan Risiko Bencana (PRB) dalam kegiatan Pendidikan di Sekolah: Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
- Kementrian Pertahanan. 2013. *Buku Putih Pertahanan*. Jakarta
- Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana No. 04 Tahun 2012 tentang Pedoman Penerapan Sekolah Aman Bencana
- Rapangile, Willem. 2018. *Paparan Kepala BNPB dalam Kongres Teknologi nasional, BPPT*. Jakarta : Tanggal 17 Juli 2018
- Save Childern, *International Day Disaster Reduction 2017*. Diakses dalam laman <https://www.savethechildren.net/article/international-day-disaster-reduction-2017-school-safe-school>
- Sudjana, Nana. 1989. Penilaian Hasil Proses Belajar. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset
- Sudjono, Anas. 2008. Pengantar Evaluasi Pendidikan. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
- Sofyan, M. Al-Nashr. 2015. Integrasi Pendidikan Siaga Bencana dalam Kurikulum MI, Jurnal Magistra – Vol 6
- Terminology United Nation International Strategy for Disaster Reduction (UNISDR). 2009*
- Twigg, John. 2015. *Disaster Risk Reduction*. London : Humanitarian Policy Group Overseas Development Institute
- Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara